



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2016

NOMOR : 700/IP/824/2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Cut NyakDienTelp. (0761) 22300, Fax. (07610 23256

PEKANBARU

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2016**

NOMOR : 700/IP/824/2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

Nomor : Pekanbaru, 2017
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
di -

Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2313/M.PANRB/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2016, dengan tujuan :
 - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 2) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

3. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

4. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 65,50 termasuk kategori **"B"** atau **Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,60
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,45
4.	Evaluasi Internal	10	2,33
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	13,11
Jumlah		100	65,50

5. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 memperoleh nilai 25,60 dari bobot nilai 30, yang merupakan hasil penilaian terhadap Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Sub komponen perencanaan kinerja yang dinilai tersebut, terdiri dari :

(1) Perencanaan Strategis

Hasil penilaian terhadap Perencanaan Strategis memperoleh nilai sebesar 9,00 dari bobot nilai 10.

(2) Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil penilaian terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai

sebesar 16.60 dari bobot nilai 20.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 15 dari bobot nilai 25, yang merupakan hasil penilaian terhadap Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran. Sub komponen pengukuran kinerja yang dinilai tersebut terdiri dari :

(1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil penilaian terhadap Pemenuhan Pengukuran sebesar 4.38 dari bobot nilai 5.

(2) Kualitas Pengukuran

Hasil penilaian terhadap Kualitas Pengukuran sebesar 8.13 dari bobot nilai 12,5, hal ini disebabkan :

- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

(3) Implementasi Pengukuran

Hasil penilaian terhadap Implementasi Pengukuran sebesar 2.50 dari bobot nilai 7,50.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 9,45 dari bobot nilai 15, yang merupakan hasil penilaian terhadap Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Sub komponen pelaporan kinerja yang dinilai tersebut terdiri dari :

(1) Pemenuhan Pelaporan

Hasil penilaian terhadap Pemenuhan Pelaporan memperoleh nilai sebesar 3 dari bobot nilai 3.

(2) Penyajian Informasi Kinerja

Hasil penilaian terhadap Penyajian Informasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 3,75 dari bobot nilai 7,50, hal ini disebabkan :

- Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan; dan

- Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

(3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil penilaian terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 2,70 dari bobot nilai 4,50.

4) Evaluasi Internal

Evaluasi internal pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 2,33 dari bobot nilai 10, yang merupakan hasil penilaian terhadap Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi. Sub komponen evaluasi internal yang dinilai tersebut terdiri dari :

(1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil penilaian terhadap Pemenuhan Evaluasi memperoleh nilai sebesar 1,33 dari bobot nilai 2, hal ini disebabkan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.

(2) Kualitas Evaluasi

Hasil penilaian terhadap Kualitas Evaluasi memperoleh nilai sebesar 0,63 dari bobot nilai 5, hal ini disebabkan :

- Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; dan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.

(3) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil penilai terhadap Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai sebesar 0,38 dari bobot nilai 3, hal ini disebabkan :

- Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan

- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau memperoleh nilai sebesar 13,11 dari bobot nilai 20, yang merupakan hasil penilaian terhadap Kinerja Yang Dilaporkan (Output) dan Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome). Sub komponen evaluasi internal yang dinilai tersebut terdiri dari:

(1) Kinerja Yang Dilaporkan (Output)

Hasil penilaian terhadap Kinerja Yang Dilaporkan (Output) memperoleh nilai sebesar 4,00 dari bobot nilai 7,50.

(2) Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Hasil penilaian terhadap Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) memperoleh nilai sebesar 9,11 dari bobot nilai 12,50.

Rincian terkait capaian nilai kinerja per komponen, sub komponen, sub-sub komponen dan indikator disajikan terlampir (Lembar Kriteria Evaluasi).

(3) Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang Belum Ditindaklanjuti

Rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 700/IP/551/2016 tanggal 31 Desember 2016 yang belum ditindaklanjuti yaitu :

a. Untuk Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- Meningkatkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan menyajikan informasi yang dapat diandalkan serta selaras dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD/RPJMD.

Terhadap rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi LAKIP tahun 2015 yang belum ada tindaklanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan saran dan rekomendasi.

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1) Untuk Pengukuran Kinerja

- Melakukan pengembangan terhadap pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;

2) Untuk **Pelaporan Kinerja**

- Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara data kinerja yang memadai realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

3) Untuk **Evaluasi Internal**

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi;
- Melaksanakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program;
- Menggunakan hasil evaluasi program untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- Evaluasi program agar memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja;
- Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar dapat menunjukkan perbaikan setiap periode;
- Hasil evaluasi program agar dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan mendatang; dan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

4) Untuk **Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

- Meningkatkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dengan menyajikan informasi yang dapat diandalkan serta selaras dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD/RPJMD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Drs. EVANDES FAJRI, Ak. CA

Pembina Utama Muda

NIP. 19641207 199203 1 010

Tembusan Kepada Yth :
Bapak Gubernur Riau

LEMBAR KRITERIA EVALUASI (SEMENTARA)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	85.33%	25.60
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	90.00%	9.00
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	100.00%	5.00
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1.00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1.00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1.00
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	66.67%	2.00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0.50
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		C	0.50
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	83.00%	16.60
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	90.00%	9.00
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00

9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0.75
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0.75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0.75
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	60.00%	3.60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		C	0.50
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0.50
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		C	0.50
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		C	0.50
PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	60.00%	15.00
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	87.50%	4.38
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0.75
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0.75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	65.00%	8.13
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		C	0.50
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		C	0.50
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		C	0.50
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	33.33%	2.50
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0.50
19	IKU telah direviu secara berkala		C	0.50

20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-
PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	63.00%	9.45
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	50.00%	3.75
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		C	0.50
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		D	0.25
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		D	-
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0.50
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50
EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	23.33%	2.33
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	66.67%	1.33
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		D	-
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	12.50%	0.63
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		D	0.25
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		D	0.25
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		D	0.25
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		E	-
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		E	-
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	12.50%	0.38
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		D	0.25
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-
IV. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	65.57%	13.11
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	53.33%	4.00
1	Target dapat dicapai		B	2.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	182.29%	9.11
4	Target dapat dicapai			3.65
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.72
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3.75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	65.50%	65.50